



PENGUMUMAN
NOMOR : 800/PMN-01/PANSELASN-JABAR/2024

PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan



Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2024;

8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 sebanyak 899 formasi dengan rincian :

1. Tenaga Kesehatan : 146 Formasi

Rincian formasi dapat di akses pada <https://s.id/FormasiCPNS-Nakes-2024> (lampiran I)

2. Tenaga Teknis : 753 Formasi

Rincian formasi dapat di akses pada <https://s.id/FormasiCPNS-Teknis-2024> (lampiran II)

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut secara umum dapat dilihat di tautan <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;



5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses penetapan nomor induk pegawai;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) formasi jabatan;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Formasi Jabatan; dan
14. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis formasi jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Khusus Tenaga Kesehatan

- a. Batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut :
 - 1) Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan
 - 2) Dokter pendidikan klinis;
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar.
 - 1) STR dikeluarkan oleh instansi berwenang
 - 2) STR masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR
- c. Daftar jenis jabatan fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai: Pendidikan D-III, D-IV, S-1, Profesi, S-2 minimal = 2,75 pada skala 4,00;
- e. Tenaga Kesehatan Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan.
- f. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah.

2. Persyaratan Khusus Tenaga Teknis

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b. Pelamar yang melamar jabatan dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat memiliki nilai dalam ijazah atau NEM, SKHUN atau lainnya setara dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan minimal rata-rata nilai 9.00 pada skala 1-10 atau rata-rata nilai 90 pada skala 10-100 atau berpredikat sangat baik.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai: Pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2 minimal = 2,75 pada skala 4,00;



- d. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- e. Akreditasi program studi/perguruan tinggi negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi Akreditasi dapat diperoleh melalui :
 - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI.
 - 2) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- f. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Manajemen / D-IV Manajemen.

3. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN BKN;
- b. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- c. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan penyandang disabilitas dengan ketentuan mengikuti persyaratan jabatan yang dilamar.



4. Persyaratan Khusus Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024

- a. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023.
- b. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan :
 - 1) Melamar di Sistem SSCASN BKN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada unit kerja yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024
- c. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- d. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
- e. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

5. Persyaratan Khusus PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Mengikuti Seleksi CPNS 2024

- a. Melamar pada jenis lowongan pengadaan kebutuhan CPNS tahun 2024 dengan kewajiban memenuhi persyaratan Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dari tanggal awal perjanjian kerja.



- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan memenuhi persyaratan umum lainnya dalam pelamaran CPNS. Ketentuan batas usia paling tinggi dikecualikan bagi jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta Dokter pendidikan klinis dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- c. Mendapatkan persetujuan/ijin dari Pimpinan unit kerja dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- d. Memiliki hasil evaluasi tahunan minimal bernilai baik yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir berpredikat baik.
- e. Pelamar yang tidak memiliki persetujuan/ijin dari Pimpinan unit kerja tidak dapat melakukan proses pelamaran formasi CPNS tahun 2024 pada aplikasi SSCASN BKN.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>;
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen (**wajib**) **asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di-scan berwarna (wajib)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau surat keterangan kependudukan atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung**, diketik komputer ditandatangani menggunakan pena bertinta



- hitam/biru dan dibubuhi **e-materai**. Format dapat diunduh pada <https://s.id/FormatSuratLamaran> (lampiran III);
3. **Pas foto formal** terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
 4. **Ijazah asli bukan Surat Keterangan Lulus (SKL) sesuai kualifikasi Pendidikan**. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 5. **Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan**. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
 6. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **materai e-materai**. Format dapat diunduh pada <https://s.id/SuratPernyataan5poin> (lampiran IV);
 7. **Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT** dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
 8. **STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar**;
 9. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;



5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS T.A 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.s. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025



*** Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>*

IX. LAIN-LAIN

1. Titik lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar akan diumumkan kemudian;
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
4. Keputusan Panitia Penerimaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai ASN;
7. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 menjadi tanggung jawab peserta;
9. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 membuka **helpdesk** melalui Nomor **whatsapp** 0821-2602-8183 (tidak menerima SMS dan telepon, aktif melayani setiap hari pukul 08.00 – 16.00);



11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan melalui:

Instagram : @bkd.jabar

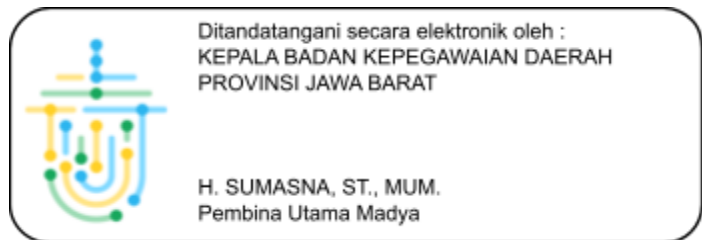
Youtube Channel : BKD PROVJABAR

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id>:

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 19 Agustus 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



2D920E8072

**DAFTAR NOMINATIF ALOKASI KEBUTUHAN FORMASI CPNS TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / S-1 PARIWISATA / S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMASARAN	S-1 PARIWISATA / D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
3	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 HUKUM
4	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 HUKUM
5	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 HUKUM
6	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	S-1 HUKUM
7	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	S-1 HUKUM
8	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	S-1 HUKUM
9	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	S-1 HUKUM
10	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	S-1 HUKUM

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
11	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Seksi Kedaruratan	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 KLIMATOLOGI / S-1 TEKNIK GEOLOGI
12	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Seksi Rehabilitasi	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN	S-1 MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / S-1 EKONOMI
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR UMUM & KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM & EVALUASI PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG ENERGI	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN	D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 HUKUM
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN
22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
23	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KONSUMSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI
24	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI	S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 KEBIJAKAN PANGAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS
25	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN	S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK
26	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI
27	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	D-IV KELAUTAN / D-IV PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
28	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN
29	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN
30	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN
31	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG TANAMAN PANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN
32	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	UMUM	6	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA	D-III PERTANIAN
33	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN
34	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN
35	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN	D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KELAUTAN
36	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN	D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KELAUTAN / D-IV TEKNIK REKAYASA KELAUTAN / S-1 TEKNIK REKAYASA KELAUTAN
37	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA	S-1 ILMU KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
38	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	S-1 TEKNIK INDUSTRI
39	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INDUSTRI
40	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL
41	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN
42	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN
43	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
44	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK
45	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 KEARSIPAN
46	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL
47	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
48	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
49	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL
50	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 MANAJEMEN
51	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA INDONESIA / D-III KEARSIPAN / D-III KOPERASI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
52	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN
53	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III KEARSIPAN
54	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI
55	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D-III KEARSIPAN
56	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	D-III KEARSIPAN
57	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI
58	ARSIPARIS TERAMPIL	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI
59	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III KEARSIPAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN
60	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III JURNALISTIK / D-III PERPUSTAKAAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
61	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN	D-III TEKNIK PENANGKAPAN IKAN / D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
62	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU II	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM
63	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU III	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM
64	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
65	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU II	S-1 AKUNTANSI
66	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU II	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
67	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU I	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
68	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM
69	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU I	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM
70	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU IV	S-1 TEKNIK SIPIL
71	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU IV	S-1 AKUNTANSI
72	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU III	S-1 TEKNIK SIPIL
73	DOKUMENTALIS HUKUM	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DPRD BAGIAN FASILITASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
74	DOKUMENTALIS HUKUM	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN
75	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	7	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN
76	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN
77	FASILITATOR PEMERINTAHAN	DISABILITAS	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
78	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK
79	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 AKUNTANSI
80	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI
81	FASILITATOR PEMERINTAHAN	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI
82	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG BINA DESA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
83	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI
84	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT
85	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	9	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK
86	FASILITATOR PEMERINTAHAN	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
87	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN	S-1 HUKUM
88	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN
89	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN
90	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
91	FASILITATOR PEMERINTAHAN	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
92	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK
93	FASILITATOR PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA WANITA MANDIRI	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK
94	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG ENERGI	D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK FISIKA
95	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR	D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK FISIKA
96	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA	D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
97	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI	S-1 BAHASA JEPANG / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS
98	KURATOR	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
99	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG E-GOVERNMENT	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI
100	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN
101	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN
102	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	PROFESI DOKTER HEWAN
103	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	PROFESI DOKTER HEWAN
104	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	PROFESI DOKTER HEWAN
105	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PROFESI DOKTER HEWAN
106	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN
107	OPERATOR ALAT BERAT	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I	D-III TEKNIK ALAT BERAT
108	OPERATOR ALAT BERAT	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV	D-III TEKNIK ALAT BERAT

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
109	OPERATOR ALAT BERAT	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III	D-III TEKNIK ALAT BERAT
110	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	SLTA/SMA SEDERAJAT
111	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT	S-1 SEJARAH / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 KIMIA
112	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 SEJARAH / S-1 ANTROPOLOGI
113	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BIDANG DESTINASI PARIWISATA	S-1 ANTROPOLOGI
114	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
115	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
116	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	12	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
117	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
118	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
119	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
120	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
121	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN
122	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	13	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER
123	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA
124	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER
125	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER
126	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER
127	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
128	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK
129	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER
130	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
131	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
132	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SOSIAL UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARSA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
133	PELATIH DAN PERAWAT SATWA LIAR	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	SMK PERTANIAN
134	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI / S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN
135	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 HUKUM
136	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	10	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	S-1 PERENCANAAN KOTA / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA GEOMATIKA / S-1 RANCANG KOTA / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK GEODESI / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / D-IV GEOLOGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN
137	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III	S-1 GEOLOGI / D-IV ARSITEKTUR / D-IV GEOLOGI / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP
138	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	11	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV REKAYASA KELAUTAN / D-IV REKAYASA SIPIL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / D-IV PERENCANAAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV GEOLOGI / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV REKAYASA MATERIAL / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
139	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV GEOLOGI / D-IV REKAYASA GEOMATIKA / D-IV REKAYASA MATERIAL / D-IV TEKNIK METALURGI / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 RANCANG KOTA / S-1 REKAYASA GEOLOGI
140	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	6	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG TEKNIK JALAN	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV GEOLOGI / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PLANOLOGI / D-IV REKAYASA GEOMATIKA / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 RANCANG KOTA
141	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	9	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT / D-IV REKAYASA KELAUTAN / D-IV REKAYASA GEOMATIKA / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV TEKNIK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					PLANOLOGI / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PLANOLOGI / D-IV GEOLOGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN
142	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG TEKNIK JALAN	D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
143	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV SUBBAGIAN TATA USAHA	D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNIK METALURGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / D-IV REKAYASA GEOLOGI / D-IV REKAYASA GEODESI / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNIK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL
144	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN	D-IV ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL
145	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV	D-IV ARSITEKTUR / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN
146	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI	D-IV GEOLOGI / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV TEKNIK GEOMATIKA / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
147	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA	D-IV ILMU PERIKANAN / D-IV BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
148	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN	D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNOLOGI KELAUTAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / D-IV ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA
149	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	S-1 KEDOKTERAN HEWAN
150	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	S-1 FARMASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
151	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KEBIDANAN / S-1 KEBIDANAN / S-1 GIZI / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN
152	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	S-1 KEDOKTERAN
153	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	S-1 PSIKOLOGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEBIDANAN
154	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
155	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 SOSIOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
156	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
157	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN
158	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
159	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
160	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN
161	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
162	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
163	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
164	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
165	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
166	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
167	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
168	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
169	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
170	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG JASA KONSTRUKSI	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
171	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
172	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
173	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
174	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN	D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERTANAHAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEODESI / D-IV TEKNIK GEODESI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
175	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA	S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK FISIKA
176	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON	S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 GEODESI / S-1 PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 GEOLOGI
177	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA	S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN
178	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
179	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI
180	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER
181	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	10	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI
182	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	DISABILITAS	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI
183	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG JASA KONSTRUKSI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
184	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER
185	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
186	PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR	S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO
187	PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA	D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO
188	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	UMUM	6	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG	D-III PENGUKURAN / D-III MANAJEMEN / D-III PERTANAHAN / D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III STATISTIK / D-III TEKNIK SIPIL / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA / D-III PEMETAAN / D-III GEOMATIKA / D-III GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III PERTANIAN
189	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN	D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN
190	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III MANAJEMEN ASET / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
191	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	7	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III MANAJEMEN ASET / D-III AKUNTANSI
192	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
193	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
194	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	8	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET
195	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	DISABILITAS	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET
196	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN TATA USAHA	D-III MANAJEMEN
197	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Seksi Rehabilitasi	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL
198	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG	D-IV ARSITEKTUR / D-IV GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI LINGKUNGAN / D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK GEODESI / D-IV TEKNIK GEOMATIKA / S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
199	PENELITI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	S-2 MANAJEMEN / S-2 MATEMATIKA / S-2 METEOROLOGI / S-2 KIMIA / S-2 ADMINISTRASI BISNIS / S-2 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-2 ADMINISTRASI PAJAK / S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-2 AGAMA DAN BUDAYA / S-2 AGRIBISNIS / S-2 AGROBIODIVERSITY / S-2 AGROEKOTEKNOLOGI / S-2 AGROFORESTRI TROPIS / S-2 AGRONOMI / S-2 AGROTEKNOLOGI / S-2 AKUAKULTUR / S-2 AKUNTANSI / S-2 ANTROPOLOGI / S-2 ARKEOLOGI / S-2 ARSITEKTUR / S-2 ASTRONOMI / S-2 ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER / S-2 BAHASA INGGRIS / S-2 BIG DATA ANALYTIC / S-2 BIOLOGI / S-2 BIOKIMIA / S-2 BIOFISIKA / S-2 DESAIN / S-2 DESAIN INTERIOR / S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-2 EKONOMI / S-2 EKONOMI BISNIS / S-2 EKONOMI SYARIAH / S-2 ENTOMOLOGI / S-2 FARMASI / S-2 FILSAFAT / S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 BIOMANAJEMEN / S-2 ILMU MANAJEMEN
200	PENELITI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	S-2 MANAJEMEN / S-2 MATEMATIKA / S-2 METEOROLOGI / S-2 KIMIA / S-2 ADMINISTRASI BISNIS / S-2 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-2 ADMINISTRASI PAJAK / S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / S-2 AGAMA DAN BUDAYA / S-2

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					AGRIBISNIS / S-2 AGROBIODIVERSITY / S-2 AGROEKOTEKNOLOGI / S-2 AGROFORESTRI TROPIS / S-2 AGRONOMI / S-2 AGROTEKNOLOGI / S-2 AKUAKULTUR / S-2 AKUNTANSI / S-2 ANTROPOLOGI / S-2 ARKEOLOGI / S-2 ARSITEKTUR / S-2 ASTRONOMI / S-2 ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER / S-2 BAHASA INGGRIS / S-2 BIG DATA ANALYTIC / S-2 BIOLOGI / S-2 BIOKIMIA / S-2 BIOFISIKA / S-2 DESAIN / S-2 DESAIN INTERIOR / S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-2 EKONOMI / S-2 EKONOMI BISNIS / S-2 EKONOMI SYARIAH / S-2 ENTOMOLOGI / S-2 FARMASI / S-2 FILSAFAT / S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 ILMU MANAJEMEN
201	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN	D-IV MEKANISASI PERTANIAN / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN
202	PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	D-III AGRONOMI / D-III PERKEBUNAN / D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III PERBENIHAN / D-III PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN / D-III TEKNOLOGI BENIH / D-III TEKNOLOGI PERTANIAN
203	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN
204	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
205	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
206	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PRODUKSI TERNAK / D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA
207	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PRODUKSI TERNAK / D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
208	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PRODUKSI TERNAK / D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA
209	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK
210	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG	S-1 HUKUM
211	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR	S-1 HUKUM
212	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG	S-1 TEKNIK INDUSTRI
213	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR	S-1 TEKNIK INDUSTRI
214	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM / S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 USAHA KOPERASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 HUKUM EKONOMI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					SYARIAH / S-1 HUKUM BISNIS / S-1 HUKUM
215	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENAAATAN HUKUM LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI
216	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 AGROTEKNOLOGI / D-IV PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN
217	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG KONSUMSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D-IV AGRO BISNIS / D-IV PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 AGROINDUSTRI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI
218	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	D-IV AGRO BISNIS / D-IV PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROINDUSTRI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
219	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	D-IV PERTANIAN / D-IV AGRO BISNIS / S-1 AGROBISNIS / D-IV PETERNAKAN / S-1 PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN
220	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 KIMIA / S-1 ILMU PETERNAKAN
221	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
222	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK
223	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
224	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	D-III KIMIA / D-III PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK
225	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	D-III KIMIA / D-III PETERNAKAN
226	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	D-III KIMIA / D-III PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK
227	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	D-III PETERNAKAN / D-III KIMIA
228	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG	D-III KIMIA / D-III PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK
229	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	S-1 HUKUM
230	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU ATAU SAINS PERIKANAN / D-IV PERIKANAN TANGKAP / D-IV PERMESINAN PERIKANAN / D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
231	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS JALAN	D-IV TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL
232	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN JALAN	D-IV TRANSPORTASI DARAT / S-1 TEKNIK SIPIL
233	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN	D-IV AKUAKULTUR / D-IV BIOLOGI / D-IV ILMU ATAU SAINS KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
234	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN	S-1 BIOLOGI / D-IV BIOLOGI / S-1 ILMU KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN
235	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA	D-IV EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN / S-1 EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN
236	PENGELOLA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR	D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO
237	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEBIDANAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III FISIOTERAPI
238	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN
239	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	D-III AKUPUNTUR / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III AUDIOLOGI / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III TERAPI OKUPASI
240	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III ANALIS KESEHATAN
241	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III FISIOTERAPI / D-III PENGOBATAN TRADISIONAL
242	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
243	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	D-III SOSIOLOGI PEDESAAN / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN
244	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
245	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
246	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	UMUM	8	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS
247	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP	D-IV PENYULUH PERIKANAN / D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / D-IV PERMESINAN PERIKANAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP
248	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN	S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP
249	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN
250	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR BIDANG PERENCANAAN TEKNIK	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
251	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN
252	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MANFAAT	S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR
253	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI	S-1 MANAJEMEN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI / S-1 AKUNTANSI / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER
254	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRAUSAHA	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA
255	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
256	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
257	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
258	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII KUNINGAN	S-1 KEHUTANAN
259	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV CIANJUR	S-1 KEHUTANAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 ANTROPOLOGI
260	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II PURWAKARTA	S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KONSERVASI HUTAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN
261	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI TASIKMALAYA	S-1 KEHUTANAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN
262	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN
263	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III SUKABUMI	S-1 AGRIBISNIS / S-1 BIOLOGI TERAPAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA
264	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII CIAMIS	S-1 KEHUTANAN / S-1 PENGELOLAAN HUTAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN
265	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN UPTD TAMAN HUTAN RAYA IRH DJUANDA	S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN / S-1 BUDIDAYA HUTAN / S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 KONSERVASI HUTAN / S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA / S-1 MANAJEMEN HUTAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
266	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX SUMEDANG	D-III KEHUTANAN
267	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII CIAMIS	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN
268	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I BOGOR	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
269	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV CIANJUR	D-III BUDI DAYA TANAMAN HORTIKULTURA / D-III BUDI DAYA PERTANIAN LAHAN KERING / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN
270	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN
271	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II PURWAKARTA	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III BUDI DAYA PERTANIAN LAHAN KERING / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN
272	PENGENDALI KONTEN INTERNET	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
273	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI BENIH KENTANG	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
274	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI BENIH HORTIKULTURA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
275	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA	S-1 AGRONOMI / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
276	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	UMUM	20	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
277	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL	UMUM	15	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	D-III AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / D-III AGRONOMI / D-III AGROTEKNOLOGI (MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / D-III PERLINDUNGAN TANAMAN / D-III PROTEKSI TANAMAN / D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
278	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG	D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV KIMIA TERAPAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK FISIKA
279	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON	D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV KIMIA TERAPAN
280	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR	D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV KIMIA TERAPAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK FISIKA
281	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG	S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV KIMIA TERAPAN / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA
282	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III SUKABUMI	SMK KEHUTANAN
283	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I BOGOR	SMK KEHUTANAN
284	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II PURWAKARTA	SMK KEHUTANAN
285	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX SUMEDANG	SMK KEHUTANAN
286	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII KUNINGAN	SMK KEHUTANAN
287	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII CIAMIS	SMK KEHUTANAN
288	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III SUKABUMI	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN
289	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX SUMEDANG	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III ILMU KEHUTANAN
290	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I BOGOR	D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
291	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII KUNINGAN	D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN
292	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV CIANJUR	D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN
293	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI TASIKMALAYA	D-III ILMU KEHUTANAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN
294	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII CIAMIS	D-III ILMU KEHUTANAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PERIKANAN / D-III PERIKANAN TANGKAP
295	PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II PURWAKARTA	D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN / D-III ILMU KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN / D-III KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN
296	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN
297	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG KONSERVASI DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
298	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	S-1 TEKNIK INDUSTRI
299	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA	S-1 TEKNIK INDUSTRI
300	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG TEKNIK JALAN	S-1 HUKUM
301	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 HUKUM

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
302	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	S-1 HUKUM
303	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN
304	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
305	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT	S-2 MANAJEMEN PAJAK / S-2 MANAJEMEN KEUANGAN / S-2 PERENCANAAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
306	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA / D-IV AGRIBISNIS PANGAN / D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN / D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN / D-IV AGRIBISNIS UNGGAS / D-IV AGROINDUSTRI KOPI / D-IV AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV ANALISIS KEUANGAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN BISNIS
307	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 PLANOLOGI
308	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ILMU STATISTIK
309	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 TEKNIK INDUSTRI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
310	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 PLANOLOGI
311	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN
312	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	S-2 MANAJEMEN
313	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-2 EKONOMI SUMBER DAYA
314	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMPUTER
315	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	S-2 STUDI PEMBANGUNAN
316	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL
317	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN
318	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 ILMU KELAUTAN
319	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	S-1 PLANOLOGI
320	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI
321	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
322	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT	D-IV AGRIBISNIS PANGAN / D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
323	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
324	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	S-2 TRANSPORTASI
325	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 ILMU EKONOMI
326	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	10	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	D-III LLASD / D-III MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
327	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN JALAN	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
328	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS JALAN	D-III LLAJ / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
329	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	10	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I	D-III LLAJ / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
330	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	9	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II	D-III LLAJ / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
331	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	9	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV	D-III LLAJ / D-III MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
332	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	UMUM	8	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III	D-III LLAJ / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN
333	PETUGAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
334	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	UMUM	6	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT
335	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI
336	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI
337	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT	D-III SISTEM INFORMASI
338	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN TATA USAHA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	D-III KOMUNIKASI / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT
339	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
340	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
341	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGIAN TATA USAHA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL
342	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III JURNALISTIK
343	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DAERAH	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
344	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SEKRETARIAT	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III FOTOGRAFI / D-III JURNALISTIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN
345	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI
346	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-III KOMUNIKASI / D-III FOTOGRAFI
347	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III JURNALISTIK / D-III KOMUNIKASI
348	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT	D-III DESAIN GRAFIS
349	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN	S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
350	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ILMU KOMPUTASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
351	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / S-1 ILMU INFORMATIKA
352	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
353	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER
354	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
355	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
356	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
357	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI
358	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER
359	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT	S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
360	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN	S-1 ILMU KOMPUTER
361	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT KEPALA BIDANG MUTU DAN AKREDITASI KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIK	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
362	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI BIDANG MUTU DAN AKREDITASI SEKSI SIMRS DAN REKAM MEDIS	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER
363	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM,KEPEGAWAIAN DAN KEHUMASAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS
364	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
365	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT	D-III TEKNIK INFORMATIKA
366	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR UMUM & KEUANGAN BAGIAN UMUM, HUKUM & PEMASARAN SUB. BAGIAN TATA USAHA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS
367	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR UMUM & KEUANGAN BAGIAN UMUM, HUKUM & PEMASARAN SUB. BAGIAN TATA USAHA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS
368	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	S-2 STATISTIKA / S-2 STATISTIKA TERAPAN / S-2 SAINS DATA / S-2 SAINS DATA TERAPAN
369	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT	S-1 STATISTIKA
370	STATISTISI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL	S-1 STATISTIKA
371	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR BIDANG PERENCANAAN TEKNIK	D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
372	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG TEKNIK JALAN	D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERTANAHAN / D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM / S-1 MANAJEMEN

**DAFTAR NOMINATIF ALOKASI KEBUTUHAN FORMASI CPNS TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI FARMASI	PROFESI APOTEKER
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI FARMASI	PROFESI APOTEKER
3	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI FARMASI	D-III FARMASI
4	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF	D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN (KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK) / D-III KEPERAWATAN (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021)
5	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALANSI MATERNAL PERINATAL	D-III KEBIDANAN
6	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI MATERNAL PERINATAL	D-III KEBIDANAN
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - NEONATOLOGI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK (ERIA)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-INTENSIF CARE/ICU	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF - ANESTESI KARDIOVASKULAR DAN CRITICAL CARE
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- FETOMATERNAL (KFM)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - KEDOKTERAN FETOMATERNAL
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH-KARDIOLOGI INTERVENSI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	SUBSPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH - JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KARDIOLOGI INTERVENSI
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- FETOMATERNAL (KFM)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - KEDOKTERAN FETOMATERNAL
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI LABORATORIUM	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-	SPESIALIS UROLOGI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
				IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS MATA
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS INSTALASI RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOTERAPI	SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT SEKSI PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL	SPESIALIS BEDAH
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT INAP	DOKTER SPESIALIS ANAK
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	5	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI GAWAT DARURAT	PROFESI DOKTER

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS ANAK
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN, KEPALA, LEHER
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT INAP	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA
33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI GAWAT DARURAT	PROFESI DOKTER
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT INAP	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI LABORATORIUM	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
41	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS UROLOGI
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI GAWAT DARURAT	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
43	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL	DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR
44	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
45	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT INAP	SPESIALIS BEDAH
46	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS ANAK
47	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JiWA ATAU PSIKIATRI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT SEKSI PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN JiWA
48	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT SEKSI PELAYANAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
49	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS PENYAKIT DALAM
50	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS ANAK
51	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI LABORATORIUM	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
52	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
53	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOTERAPI	SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI
54	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
55	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT SEKSI PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS NEUROLOGI
56	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK
57	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
58	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
59	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT INAP	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
60	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI LABORATORIUM	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
61	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
62	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS NEUROLOGI
63	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI BEDAH SENTRAL	SPESIALIS NEUROLOGI
64	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI IGD	PROFESI DOKTER
65	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS MATA
66	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS BEDAH
67	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
68	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI BEDAH SENTRAL	SPESIALIS BEDAH SARAF
69	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
70	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS ANAK

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
71	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR
72	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN, KEPALA, LEHER
73	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RAWAT JALAN	PROFESI DOKTER GIGI
74	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI RAWAT JALAN	SPESIALIS KONSERVASI GIGI
75	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	D-IV ENTOMOLOGI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT ENTOMOLOGI KESEHATAN)
76	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN (MINAT ENTOMOLOGI KESEHATAN)
77	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN (MINAT ENTOMOLOGI KESEHATAN)
78	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOTERAPI	S-1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS) / PROFESI FISIKAWAN MEDIK / S-2 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-2 FISIKA MEDIK
79	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK	D-IV FISIOTERAPI / PROFESI FISIOTERAPIS
80	FISIOTERAPIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK	D-III FISIOTERAPI

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
81	FISIOTERAPIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI RAWAT JALAN	D-III FISIOTERAPI
82	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI GIZI	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI
83	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	UMUM	4	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI REHABILITASI MEDIS PSIKIATRI	D-III OKUPASI TERAPI / D-III TERAPI OKUPASI
84	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT KEPALA BIDANG MUTU DAN AKREDITASI KEPALA SEKSI AKREDITASI	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
85	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT KEPALA BIDANG MUTU DAN AKREDITASI KEPALA SEKSI AKREDITASI	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
86	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI GAWAT DARURAT	D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021) / D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / NERS

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
					(MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021)
87	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI BEDAH SENTRAL	D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021) / NERS (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021)
88	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF	D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021) / NERS (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021)
89	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT INSTALASI BEDAH SENTRAL	D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021) / NERS (MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021)
90	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RAWAT INAP	PROFESI NERS
91	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	D-III KEPERAWATAN

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
92	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI REKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIK / D-IV PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 REKAM MEDIS / S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
93	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI REKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK / D-III ILMU REKAM MEDIS
94	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI LABORATORIUM	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
95	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT INSTALASI RAWAT JALAN	S-1 PSIKOLOGI + PENGUKUHAN PSIKOLOG KLINIS / S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS
96	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA	S-1 PSIKOLOGI + PENGUKUHAN PSIKOLOG KLINIS / S-1 PSIKOLOGI +

NO	Nama Jabatan	Jenis Formasi	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
				BARAT WAKIL DIREKTUR MEDIS, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG INSTALASI REHABILITASI MEDIS PSIKIATRI	PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS
97	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOLOGI	D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV RADIOLOGI / D-IV TEKNIK RADIOLOGI / D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN
98	RADIOGRAFER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG & KEPERAWATAN INSTALASI RADIOLOGI	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN
99	RADIOGRAFER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI RADIOLOGI	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN
100	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN WADIR UMUM & KEUANGAN INSTALASI PSRS	D-IV SAINS TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS
101	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LABORATORIUM KALIBRASI	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK
102	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI INSTALASI UTDRS	D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TRANSFUSI DARAH
103	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI
104	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	DISABILITAS	1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI